
UPAYA MENINGKATKAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MELALUI SISTEM AKREDITASI DALAM PERSPEKTIF TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) DI SDIT AR RAJWAA SAMARINDA

Koko Ari Wibowo¹, Bahrani², Akhmad Ramli³, Dida Alifvia Mutiara Fajar Devega⁴

^{1,2,3,4}UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

kokoariwibowo89@gmail.com¹, bahrani@uinsi.ac.id², akhmadramli2022@gmail.com³, devegadida.kaw@gmail.com⁴

ABSTRACT; *The accreditation process is the evaluation of a program in a single educational institution based on predetermined criteria. This accreditation establishes a system of evaluation for mutu research and educational advancement. In addition, this system serves as a benchmark for educational advancement in every region. However, even if the accreditation system has been established, there are still some schools that can use the available resources to raise their educational standards in the best possible way. Therefore, in order to proceed with school accreditation, there must also be an approach in place to ensure that the process proceeds smoothly. This method is known as Total Quality Management (TQM). This research falls within the deskriptif-kualitatif research category and gathers data through observation, documentation, and interview. According to this study, accreditation in the context of Quality Management Quality (TQM) adheres to the following principles: First, accreditation establishes the standards that are used to evaluate execution; second, school uses the assessment tools available in accreditation to evaluate ongoing educational activities (monitoring and evaluation); third, accreditation is used to identify deviations, or lapses, in the school; and finally, accreditation is used as a guide to increase the level of academic quality.*

Keywords: *Quality Of Education, School Accreditation, Total Quality Management (TQM)*

ABSTRAK; Kegiatan akreditasi adalah penilaian program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi ini menetapkan sistem penilaian untuk pengendalian mutu penyelenggaraan pembelajaran. Selain itu, sistem ini berfungsi sebagai standar untuk penyelenggaraan pendidikan di setiap jenjangnya. Namun, meskipun sistem akreditasi telah dirancang sedemikian rupa, masih sedikit sekolah yang dapat memanfaatkan alat-alat yang ada di dalamnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka secara optimal. Karena itu, untuk menjalankan akreditasi di sekolah juga memerlukan sebuah pendekatan agar prosesnya berjalan dengan

lancar. Metode ini dikenal sebagai Manajemen Kualitas Total (TQM). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif-kualitatif dan mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa akreditasi dalam perspektif Quality Management Quality (TQM) mencakup prinsip-prinsip antara lain: Pertama, akreditasi memuat standar yang dijadikan acuan pelaksanaan; Kedua, sekolah menggunakan instrumen penilaian yang ada di dalam akreditasi untuk melacak pelayanan pendidikan yang berjalan (monitoring dan evaluasi); Ketiga, akreditasi digunakan untuk menemukan deviasi, atau kekurangan, di sekolah; dan keempat, akreditasi digunakan sebagai referensi untuk peningkatan berkelanjutan dalam kualitas sekolah.

Kata Kunci: Akreditasi Sekolah, Mutu Pendidikan, Total Quality Management (TQM).

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan kualitas, pendidikan nasional bertanggung jawab untuk mengembangkan semua potensi dan kemampuan hidup, dan meningkatkan martabat manusia dalam upaya mencapai tujuan negara, yaitu meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Untuk mencapai hal itu, para pemangku kebijakan pendidikan di Indonesia kemudian menyusun kebutuhan siswa untuk setiap tingkat satuan pendidikan.

Untuk mencapai tujuan itu, kemudian dibuat aturan yang menjelaskan bagaimana di Indonesia memiliki sistem pendidikan yang baik. Rumusan itu selanjutnya dituangkan ke dalam Standar Nasional Pendidikan, yang adalah seperangkat standar pelayanan minimal untuk pelaksanaan pendidikan yang harus dipatuhi oleh semua penyelenggara pendidikan di setiap jenjang.¹ Akreditasi adalah alat penilaian yang dibutuhkan oleh setiap penyelenggara pendidikan untuk melaksanakannya.

Akreditasi dapat didefinisikan sebagai proses penilaian kualitas program di setiap satuan pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.² Akreditasi ini diberikan untuk penilaian dan pengawasan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Akreditasi juga berfungsi sebagai pengukur penyelenggaraan pendidikan di setiap jenjangnya. Ini juga berfungsi sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana kondisi nyata sekolah memenuhi standar pendidikan nasional yang sudah ditetapkan.

¹ "UU20-2003Sisdiknas.Pdf,"

² "UU20-2003Sisdiknas.Pdf,"

Setiap sekolah menggunakan sistem ini untuk mendukung peningkatan kapasitas sekolah. Evaluasi Akreditasi di sekolah juga berfungsi sebagai alat pengawasan untuk menilai kemajuan sekolah dan sebagai ukuran kualitas pendidikan. Untuk memungkinkan pelaksanaan sistem akreditasi berjalan secara sistematis dan terorganisir, perlu dibentuk badan khusus yang disebut Badan Akreditasi Nasional (BAN). BAN memiliki tanggung jawab dan fungsi untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kelayakan penyelenggaraan pendidikan.

Di tingkat sekolah atau madrasah, lembaga yang menerima akreditasi dikenal sebagai Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. BAN S/M adalah badan evaluasi independen yang menilai program dan satuan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang sudah ditetapkan.³ Sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian antara nilai-nilai yang tercakup dalam standar pendidikan nasional bersama dengan instruksi lapangan yang berlangsung. Dengan adanya badan atau lembaga khusus yang menangani akreditasi ini, diharapkan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah dan tinggi dapat semakin meningkatkan kemampuan mereka.

Meskipun sistem akreditasi ini dirancang sedemikian rupa, tidak banyak sekolah yang mampu memanfaatkan fitur yang ada dalam akreditasi untuk meningkatkan kapasitas institusi pendidikan mereka. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa banyak sekolah hanya memenuhi instrumen akreditasi untuk kegiatan visitasi semata dan kemudian tidak berjalan dengan baik setelah proses visitasi selesai. Selama proses akreditasi, yang melibatkan penyiapan dokumen sesuai dengan aturan yang ada, kinerja sekolah meningkat. Namun, setelah proses akreditasi selesai, kinerja semua bagian akan kembali normal.⁴

Sebuah pendekatan harus digunakan untuk menerapkan akreditasi di sekolah agar prosesnya berjalan lancar. Sekolah terkesan menerima kelengkapan akreditasi sekadar untuk formalitas dan biasanya tidak digunakan secara aktif dalam kehidupan sehari-hari sekolah. Metode ini kemudian dikenal sebagai Manajemen Mutu Terpadu (TQM).

Sederhananya, Quality of Quality Management (TQM) dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang umum digunakan untuk melakukan perbaikan terus menerus. Ini berarti bahwa sebuah sistem yang didekati melalui konsep TQM tidak akan berhenti hanya karena

³ "Permendikbud59-2012BAN.Pdf,"

⁴ Didin Asopwan, "Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah" 2, no. 2 (2018): 8.

sistem tersebut berjalan, tetapi harus terus berkembang. Diharapkan bahwa sistem akreditasi yang diterapkan melalui pendekatan Total Quality Management (TQM) akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi sekolah. Dalam jangka pendek, akreditasi sekolah dapat meningkatkan minat siswa karena fakta bahwa status sekolah merupakan faktor penting dalam memilih sekolah. Namun, dalam jangka panjang, sistem akreditasi yang dilaksanakan dengan benar diharapkan dapat menghasilkan siswa yang berprestasi dan berdaya saing

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni jenis penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.⁵ Dalam hal ini, yang diteliti mengenai upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan melalui sistem akreditasi dalam perspektif Total Quality Management (TQM). Penelitian ini dilakukan di SDIT Ar Rajwaa Samarinda, yang beralamat di Jalan Bung Tomo gang rell 8 No. 60 RT. 25 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data ialah Kepala Sekolah SDIT Ar Rajwaa Samarinda yakni Dida Alifvia Mutiara Fajar Devega, S.Pd, M.Pd, Gr. dan wakil kepala bidang kurikulum, yakni Yudiana, S.Pd.

Definisi Akreditasi

Dalam beberapa literatur, akreditasi dimaknai sebagai suatu proses untuk memberikan penilaian terhadap kualitas menggunakan kriteria baku mutu yang sudah ditetapkan yang sifatnya terbuka.⁶ Sistem akreditasi ini menilai setiap sekolah dan menentukan apakah praktik penyelenggaraan pendidikannya sesuai dengan standar nasional. Akreditasi adalah proses penilaian yang mengukur kelayakan program dalam satuan pendidikan.⁷ Sejauh mana institusi pendidikan memenuhi atau bahkan melampaui standar pendidikan nasional menentukan

⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017).

⁶ “Pedoman Akreditasi Madrasah” (Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005)

⁷ Aulia Ar Rakhman Awaludin, “Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia,” *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 1 (August 9, 2017), <https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156>.

kualitas penyelenggaraan pendidikan ini. Akreditasi ini diberikan oleh BAN S/M, lembaga yang memiliki otoritas untuk menilai proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan.

Dalam proses akreditasi, yang menjadi objek penilaian adalah 8 (delapan) standar nasional pendidikan. Kedelapan standar itu antara lain:

a. Standar Isi

Standar isi mencakup kumpulan materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mengukur kompetensi lulusan di setiap jenjang pada setiap jenis pendidikan tertentu. Standar isi disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan yang ingin dicapai.⁸

b. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah standar pendidikan nasional yang mengacu pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipenuhi oleh semua siswa di setiap tingkat pendidikan.⁹ Standar ini digunakan sebagai standar untuk menentukan kelulusan siswa. Lulusan yang berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik didaftarkan selama proses akreditasi. Prestasi akademik berasal dari tes kemampuan akademik, sedangkan prestasi non akademik dapat berupa prestasi dalam olahraga, seni, atau bidang lain. Semuanya terhubung ke sistem penilaian akreditasi.

c. Standar Proses

Standar proses menjelaskan bagaimana pembelajaran dilakukan di suatu institusi pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.¹⁰ Standar proses mencakup semua aktifitas pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil pembelajaran. Untuk menjadi efektif, pembelajaran harus disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Oleh karena itu, selama proses akreditasi, hal-hal berikut akan dievaluasi: kesesuaian antara rencana pembelajaran dengan visi dan misi sekolah, persiapan sumber belajar, dan penyediaan alat peraga.¹¹

⁸ Engkoswara Engkoswara and Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012).

⁹ Bahrul Hidayat and Suhendra Yusuf, *Benchmark International Mutu Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

¹⁰ Bahrul Hidayat and Suhendra Yusuf, *Benchmark International Mutu Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).

¹¹ "Pedoman Akreditasi Madrasah."

d. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana merupakan pelayanan minimal yang berkaitan dengan fasilitas yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media, buku serta sumber bahan belajar lainnya. Sedangkan prasarana berkaitan dengan fasilitas tidak bergerak yang meliputi ruangan kelas, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, gedung perpustakaan, laboratorium, serta tempat ibadah.¹² Dalam standar sarpras ini, semua fasilitas yang ada di sekolah memiliki ukuran yang telah diatur. Pengaturan ukuran setiap fasilitas ini tentunya dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan dan psikologis peserta didik. Itu semua dalam rangka agar pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman. Sebagai contoh, dijelaskan dalam poin-poin kriteria dan perangkat akreditasi yang dirilis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 241/ P / 2019 diatur luas minimum lahan bangunan 1 lantai yakni sebesar 5299 m² , bangunan 2 lantai 2793 m², dan bangunan lantai 3 lantai sebesar 1872 m² jika sekolah tersebut memiliki rombongan belajar yang berkisar antara 7 sampai 9 kelas.¹³ Ukuran luas lahan minimum ini tentunya berbeda pada tiap jenjangnya.

e. Standar pengelolaan

Agar pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, standar pengelolaan berisi standar yang mencakup elemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang, dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional.¹⁴ Dengan menggunakan standar pengelolaan ini, sekolah dan madrasah memberikan panduan untuk membangun visi dan tujuan kelembagaan dengan menerima aspirasi dan gagasan dari semua pihak yang terlibat dalam sekolah, dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan nasional. Visi sekolah adalah tujuan untuk masa depan, yang menjadikannya penting. Dari visi besar itu, kemudian dibagi secara menyeluruh dalam misi. Ini adalah misi yang menentukan bagaimana visi akan tercapai. Setelah itu, aspirasi tersebut diputuskan dalam rapat yang dipimpin oleh kepala sekolah. Gagasan yang telah diputuskan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang ada dan seluruh warga sekolah. Terakhir, peninjauan kembali dilakukan secara rutin untuk mengikuti kemajuan sekolah.

¹² Hidayat and Yusuf, Benchmark International Mutu Pendidikan.

¹³“Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 241 / P / 2019 Tentang Kriteria Dan Perangkat Akreditasi.” (Menteri Pendidikan dan kebudayaan, 2019).

¹⁴ “PP-No-13-Tahun-2015.Pdf,” n.d.

Selama visitasi, semua hal yang berkaitan dengan standar pengelolaan harus dibuktikan dengan dokumen terkait, seperti dokumen visi, misi, dan tujuan, serta daftar hadir kegiatan perumusan instrumen penting. Setelah visitasi selesai, tim visitasi melakukan observasi langsung ke sekolah untuk memastikan bahwa dokumen yang diperlukan tersedia secara fisik. Terakhir, tim visitasi melakukan wawancara dengan orang-orang yang berkontribusi pada pembuatan dan penyebaran visi tersebut.¹⁵

f. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan mencakup standar yang mencakup komponen dan total biaya operasional pendidikan yang dibutuhkan selama satu tahun.¹⁶ Standar ini mencakup pembahasan tentang rencana kerja anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan modal kerja.¹⁷

g. Standar Penilaian

Standar penilaian memberikan pedoman untuk pendidik dalam menilai pencapaian siswa mereka.¹⁸ Standar ini mencakup aturan untuk mekanisme, prosedur, dan instrumen untuk menilai hasil belajar. Tidak ada seorang pendidik yang dapat memberikan penilaian kepada siswanya secara sembarangan. Sebaliknya, mereka harus melakukannya secara profesional dengan mempertimbangkan beberapa prinsip, salah satunya adalah bahwa penilaian harus dilakukan dengan benar, yang berarti apa yang dinilai benar-benar terjadi. Kedua tujuan, yaitu berkorelasi dengan prestasi siswa. Ketiga, adil, tidak membedakan siswa satu sama lain. Tidak menguntungkan peserta didik berdasarkan suku, agama, budaya, atau adat istiadat mereka. Prinsip keempat, terbuka, berarti siswa dapat mengetahui apa yang dinilai. Konsep kelima dapat diterima atau dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

h. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar ini mencakup persyaratan untuk pendidikan sebelum menjabat, serta kelayakan fisik dan mental.²⁰ Dalam hal ini, baik guru maupun tenaga kependidikan yang bekerja di

¹⁵ “Salinan Keputusan Mendikbud RI No. 241/ P/ 2019.”

¹⁶ “PP-No-13-Tahun-2015.Pdf.”

¹⁷ “Salinan Keputusan Mendikbud RI No. 241/ P/ 2019.”

¹⁸ “PP-No-13-Tahun-2015.Pdf.”

¹⁹ “Salinan Keputusan Mendikbud RI No. 241/ P/ 2019.”

²⁰ “PP-No-13-Tahun-2015.Pdf.”

institusi pendidikan harus memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang keahliannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa siswa akan mendapatkan layanan pendidikan yang diberikan oleh profesional.

Prinsip-Prinsip Akreditasi

Dalam penilaian akreditasi ini, beberapa prinsip harus diperhatikan agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuan akreditasi, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Prinsip-prinsip ini termasuk:²¹

- a. **Objektif:** Pada dasarnya, proses akreditasi berfungsi sebagai penilaian kemampuan institusi pendidikan. Oleh karena itu, penilaian harus dilakukan secara objektif dan sesuai dengan keadaan aktual untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan institusi.
- b. **Komprehensif:** Untuk mendapatkan informasi menyeluruh tentang sekolah, penilaian akreditasi dilakukan secara keseluruhan, tidak terbatas pada elemen tertentu.
- c. **Adil:** Semua lembaga pendidikan, baik sekolah maupun madrasah, menerima penilaian yang sama sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ini dilakukan tanpa mempertimbangkan budaya sosial-budaya, keyakinan, ras, status sekolah swasta atau negeri.
- d. **Transparan:** Setiap sekolah yang sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan akreditasi berhak untuk mengakses informasi yang relevan tentang standar, jadwal, sistem penilaian, persyaratan, dan hal-hal yang harus dipenuhi selama proses akreditasi.
- e. **Profesional:** Proses akreditasi dilakukan secara hati-hati oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, sehingga proses dan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akreditasi berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa baik praktik pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan ideal. Diharapkan bahwa akreditasi melalui serangkaian mekanisme ini dapat mendorong dan menciptakan kultur yang mendukung perkembangan lembaga pendidikan. Selain itu, dapat digunakan sebagai pedoman untuk terus berupaya mencapai kualitas yang sudah ditetapkan

²¹ Draf Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2018 (Jakarta: Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah, 2018).

dan menjamin kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Secara lebih khusus, peran akreditasi institusi pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:²²

a. Perlindungan Masyarakat (*Quality Assurance*)

Masyarakat memiliki jaminan tentang kualitas pendidikan yang mereka pilih. Oleh karena itu, hal ini akan melindungi pengguna layanan pendidikan dari tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Supriyatno et al. di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, membuat hal ini lebih jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah dengan akreditasi yang baik selalu meningkatkan jumlah siswa setiap tahun ajaran baru.²³

Dalam hal ini, akreditasi dapat membantu masyarakat mengubah cara mereka memilih sekolah untuk anak-anak mereka. Pelanggan pendidikan mendapatkan jaminan bahwa penyelenggaraan pendidikan tempat mereka berinvestasi dikelola secara serius dengan komponen berkualitas dengan adanya penilaian akreditasi ini. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah tersebut.

Di SDIT Ar Rajwaa Samarinda, manfaat akreditasi ditunjukkan dengan peningkatan jumlah siswa yang ingin bersekolah di sekolah setiap tahunnya. Di samping itu, akreditasi saat ini juga merupakan pengakuan atau legalitas sebagai layanan pendidikan yang sudah memenuhi standar pemerintah. Ini pasti meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama pengguna layanan pendidikan.

b. Pengendalian Mutu (*Quality Control*)

Dengan pengendalian mutu ini, organisasi dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian antara standar dan kenyataan lapangan.²⁴ Institusi pendidikan dapat menentukan kekuatan dan kelemahan mereka. Hasil identifikasi dapat digunakan sebagai sumber untuk evaluasi dan perencanaan rencana pengembangan dan penguatan organisasi yang berkelanjutan. Setiap sekolah atau madrasah memiliki kemampuan untuk menganalisis kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan pendidikannya melalui sistem penilaian yang dimiliki oleh akreditasi.

²² “Pedoman Akreditasi Madrasah.”

²³ Eko Supriyanto, “Pengelolaan Akreditasi Sekolah (Studi Situs Sd Negeri 2 Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo),” *Jurnal Penelitian Humaniora*, 2, 14 (2013): 9.

²⁴ Emilia Nur Chasanah Sholihin, Ibrahim Bafadal, and Asep Sunandar, “Pengelolaan Persiapan Akreditasi Sekolah,” *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan* 1, no. 2 (May 28, 2018): 171-78, <https://doi.org/10.17977/um027v1i22018p171>.

Dengan cara ini, kekurangan yang ada dapat diperbaiki dan kelebihan yang ada dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Dengan akreditasi, SDIT Ar Rajwaa Samarinda melakukan pengendalian mutu untuk memperbaiki kekurangan. Selain itu, alat akreditasi yang terus-menerus dikembangkan secara bertahap "memaksa" sekolah untuk terus meningkatkan layanan pendidikannya sesuai dengan tuntutan zaman. Akreditasi sekolah juga dapat berfungsi sebagai pengingat agar semua karyawan sekolah terus memberikan pendidikan yang baik.

c. Pengembangan Mutu (*Quality Improvement*)

Institusi pendidikan semakin termotivasi dan terpacu untuk terus mempertahankan kualitasnya. Ini dicapai dengan melakukan inovasi dan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki kesalahan. Tentu saja, hal ini dapat dicapai dengan mengacu pada standar yang ada, yang dibahas secara mendalam dalam dokumen akreditasi. Sekolah dan madrasah dapat mengidentifikasi aspek pendidikan mana yang perlu dipertahankan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas. Mereka dapat melakukannya dengan menggunakan format penilaian akreditasi ini.

Secara teknis, akreditasi memungkinkan sekolah untuk meningkatkan kualitasnya dengan melengkapi hal-hal yang belum ada. Sebelum akreditasi, biasanya ada petunjuk teknis (juknis) akreditasi yang mendorong sekolah untuk membangun atau melengkapi fasilitas yang belum ada.

1. Hasil Akreditasi

a. Acuan dalam rangka meningkatkan mutu dan perencanaan pengembangan lembaga.

Serupa dengan itu, Suryana menyatakan dalam Uum bahwa akreditasi juga merupakan alat untuk regulasi diri (*self regulation*), yaitu untuk mengukur kekuatan dan kelemahan seseorang.²⁵ Akreditasi dilakukan sebagai upaya sistematis dan terorganisir untuk memperbaiki kualitas lembaga pendidikan secara konsisten.

b. Timbal balik dalam usaha memberdayakan dan mengembangkan kinerja warga sekolah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah.

²⁵ Uum Gatot Karyanto and Arif Rahman, "Implikasi Akreditasi Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Tata Kelola Smk Negeri 1 Oku" 7, no. 2 (2015): 15.

Selanjutnya, hasil penilaian akreditasi ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari warga sekolah. Misalnya, guru menjalankan kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan proses hingga evaluasi dengan mengacu pada petunjuk teknis proses pembelajaran yang diberikan oleh instrumen akreditasi. Semua pekerja sekolah berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional.

- c. Motivasi agar lembaga pendidikan terus menerus meningkatkan kualitas pendidikan secara bertahap, terstruktur, dan kompetitif baik dari tingkat kabupaten/kota, bahkan hingga internasional.

Dengan demikian, sekolah memiliki kemampuan untuk mengukur dan menilai kualitas lembaga pendidikan mereka. Kehidupan sekolah sehari-hari dan proses pembelajaran sangat bergantung pada pencapaian akreditasi yang baik.

- d. Bahan informasi bagi sekolah.

Pertama, sumber informasi yang bermanfaat untuk mendapatkan dukungan dari pihak yang terlibat dalam pendidikan, seperti pemerintah, masyarakat, dan pihak lain, baik dalam hal profesionalisme, moral, tenaga kerja, dan sumber daya. Tentu saja, lebih mudah bagi mereka yang memiliki akreditasi yang lebih tinggi untuk mendapatkan akses dari mana saja. Selanjutnya, dari lingkungan internal sekolah. Akreditasi sebagai sumber informasi terkini. Tidak jarang, selama proses akreditasi, sekolah mendapatkan informasi baru tentang pelaksanaan pendidikan. Hal ini sebagai bentuk sistem akreditasi yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu.

- e. Acuan bagi pemangku kebijakan terkait untuk dijadikan bahan pertimbangan sebagai penyelenggara ujian nasional.

Hal ini karena sekolah dengan akreditasi yang lebih tinggi tentunya memiliki fasilitas yang lebih siap untuk ujian nasional.

2. Akreditasi Dalam Perspektif Total Quality Management (TQM) di SDIT Ar Rajwaa Samarinda

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, proses akreditasi sekolah adalah kumpulan tindakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Akreditasi sekolah adalah

upaya untuk meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas institusi pendidikan.²⁶ Ini dibuktikan dengan fakta bahwa beberapa item dalam akreditasi sekolah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Total Quality Management (TQM) yang ada. Prinsip TQM yang pertama adalah bahwa produk atau jasa harus memiliki standar. 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) mengatur standar penilaian untuk akreditasi sekolah. Standar ini digunakan untuk mengatur pendidikan di SDIT Ar Rajwaa Samarinda.

Monitoring dan evaluasi adalah prinsip yang kedua. Semua sekolah menggunakan proses akreditasi ini untuk memantau dan menilai diri mereka sendiri. Dengannya, lembaga pendidikan dapat mengetahui apakah mereka telah mencapai SNP atau bahkan melampauinya. SDIT Ar Rajwaa Samarinda memanfaatkan alat penilaian yang ada di dalam akreditasi untuk memantau pelayanan pendidikan yang berjalan. Dengan akreditasi ini, lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi aspek mana yang belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Selain itu, kekurangan yang masih ada pada saat itu diperbaiki.

Prinsip ketiga adalah menemukan penyimpangan atau deviasi. Sebagaimana diketahui, akreditasi sekolah adalah alat yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sekolah. Meskipun demikian, pelaksanaan tidak menutup celah. Ketidaksesuaian antara standar pelayanan minimal (SPM) dan akreditasi menunjukkan kekurangan akreditasi ini, menurut Witarko. Contohnya, sekolah atau madrasah harus memiliki ruang kelas minimum 6x7 menurut aturan SPM, tetapi akreditasi yang dinilai harus 7x8. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi sekolah untuk mendapatkan fasilitas fisik yang diperlukan untuk bangunan, yang tentunya tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat.

Selain itu, sekolah dapat menggunakan berbagai penilaian yang ada dalam akreditasi ini untuk mengidentifikasi area mana yang dianggap kurang atau belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Sekolah pasti dapat menggunakan akreditasi sebagai alat untuk menemukan kekurangan. Nanti kekurangan tersebut dapat diperbaiki. Untuk memperbaiki kekurangan dalam penilaian akreditasi, terutama dalam hal sarana dan prasarana, di SD IT Ar Rajwaa Samarinda, dilakukan pembelian barang yang sekiranya dapat dibeli, maka dibeli segera. Selain itu, partisipasi aktif dari semua warga sekolah dalam memperbaiki dan memperbaiki kesalahan yang tersedia dalam instrumen penilaian akreditasi.

²⁶ Marjuki Marjuki, Djemari Mardapi, and Badrun Kartowagiran, "Pengembangan model akreditasi sekolah menengah atas /madrasah aliyah (SMA/MA)," *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 22, no. 1 (June 26, 2018): 105, <https://doi.org/10.21831/pep.v22i1.9860>.

Prinsip keempat adalah kemajuan berkelanjutan. Sekolah dapat menggunakan hasil penilaian akreditasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Hasil ini dapat digunakan untuk menjaga kualitas proses pendidikan (proses) atau sebagai dasar untuk melakukan inovasi untuk mendapatkan hasil (hasil) yang sama berkualitas. Sejak diterapkan di SD IT Ar Rajwaa Samarinda, standar akreditasi digunakan sebagai dasar untuk operasi sehari-hari sekolah. Jika ada kekurangan, kekurangan tersebut dipenuhi, dan jika ada yang lebih, kelebihan tersebut diidentifikasi sebagai keunggulan yang dimiliki sekolah. Jika yang kurang dipenuhi, jika yang lebih dari minimal standar, itu menjadi satu keunggulan yang dimiliki sekolah dan digunakan sebagai cara untuk mempromosikan sekolah. Program ini ditetapkan sebagai program unggulan sekolah tanpa mengurangi keuntungan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah mempersiapkan akreditasi sekolah. Metode penilaian mengalami banyak perubahan. Mereka terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Akreditasi sekolah terdiri dari dua aspek: akreditasi sekolah sebagai proses dan akreditasi sekolah sebagai hasil. Akreditasi sekolah sebagai proses berfungsi sebagai kerangka acuan bagi setiap institusi pendidikan untuk melakukan penilaian dan evaluasi. Jika berbagai masalah terus muncul, kualitas penyelenggaraan pendidikan akan diperbaiki dengan menggunakan item-item yang tercantum dalam penilaian akreditasi tersebut.

Sebaliknya, akreditasi sebagai hasil adalah sertifikat penilaian yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki wewenang; dalam kasus ini, BAN S/M memberikan sertifikat pengakuan kepada lembaga pendidikan, yang memberi pelanggan layanan pendidikan kesempatan untuk merasa mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asopwan, Didin. "Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah" 2, no. 2 (2018): 8.
- Awaludin, Aulia Ar Rakhman. "Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 1 (August 9, 2017). <https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156>.

- Draf Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2018*. Jakarta: Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah, 2018.
- Engkoswara, Engkoswara, and Aan Komariah. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Hidayat, Bahrul, and Suhendra Yusuf. *Benchmark International Mutu Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Karyanto, Uum Gatot, and Arif Rahman. "Implikasi Akreditasi Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Tata Kelola Smk Negeri 1 Oku" 7, no. 2 (2015): 15.
- Marjuki, Marjuki, Djemari Mardapi, and Badrun Kartowagiran. "Pengembangan model akreditasi sekolah menengah atas /madrasah aliyah (SMA/MA)." *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 22, no. 1 (June 26, 2018): 105. <https://doi.org/10.21831/pep.v22i1.9860>.
- "Pedoman Akreditasi Madrasah." Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005.
- "Permendikbud59-2012BAN.Pdf," n.d. "PP-No-13-Tahun-2015.Pdf," n.d.
- "Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 241 / P / 2019 Tentang Kriteria Dan Perangkat Akreditasi." Menteri Pendidikan dan kebudayaan, 2019.
- Sholihin, Emilia Nur Chasanah, Ibrahim Bafadal, and Asep Sunandar. "Pengelolaan Persiapan Akreditasi Sekolah." *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan* 1, no. 2 (May 28, 2018): 171–78. <https://doi.org/10.17977/um027v1i22018p171>.
- Supriyanto, Eko. "Pengelolaan Akreditasi Sekolah (Studi Situs SD Negeri 2 Mranti KecamatanPurworejo Kabupaten Purworejo)." *Jurnal Penelitian Humaniora*, 2, 14 (2013): 9.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- "UU20-2003Sisdiknas.Pdf," n.d.